

Upaya *Transnational Advocacy Networks* dalam Mendorong Legalisasi *LGBT Rights* di Thailand

Intan Kinanthi Damarin Tyas

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Samarinda, Kalimantan Timur 75243, Indonesia
intan.kinanthi@gmail.com

Diserahkan: 26 Februari 2019; diterima: 10 Juli 2019

Abstract

This paper discusses discrimination and criminalization of LGBT community due to the government change in Thailand, from absolute to constitutional monarchy. This shift caused changes in the social construction of Thai society, which led to the repression of values and norms in Buddhist beliefs whose culture of tolerance with LGBT people. This condition led the movement of Transnational Advocacy Network to promote equality and justice for LGBT through the legality of LGBT Rights. Therefore, this paper wants to identify and analyze how Transnational Advocacy Network on LGBT issues in Thailand can encourage the legality of LGBT and why this issue can be accepted within Thai society. This case analyzed by using boomerang pattern approach on Transnational Advocacy Network in Thailand. Through this network, the non-government actor in Thailand has made various efforts to encourage LGBT people to achieve equality and urged the Thai government to implement LGBT Rights legality policy through the issuance of gender equality act BE 2558 in 2015. The domestic cultural values concept used in this paper also showed that Thai people started to accept the existence of LGBT community because the values and norms of Buddhist beliefs are in fact, goes hand in hand with the LGBT Rights policy in Thailand. This could mean that values and norms of Buddhist teachings about LGBT which used to be repressed can reappear in the community.

Keywords: LGBT rights, Thailand, transnational advocacy network, gender equality act.

Abstrak

Tulisan ini membahas isu diskriminasi dan kriminalisasi kaum LGBT yang terjadi di Thailand akibat perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Perubahan sistem tersebut berdampak pada perubahan konstruksi sosial masyarakat yang menyebabkan terpresinya nilai-nilai dan norma dalam kepercayaan agama Buddha mengenai kultur bertoleransi terhadap kaum LGBT. Hal ini kemudian memunculkan pergerakan *Transnational Advocacy Network* di Thailand yang bertujuan mendorong kesetaraan dan keadilan bagi kaum LGBT melalui legalitas *LGBT Rights*. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengidentifikasi dan menganalisis alasan *Transnational Advocacy Networks* dalam mendorong legalitas LGBT sehingga diterima oleh masyarakat Thailand. Dengan menggunakan pendekatan *boomerang pattern*, pada *Transnational Advocacy Network* di Thailand ditemukan berbagai upaya jaringan advokasi yang mendorong kaum LGBT untuk mencapai kesetaraan dan mendesak pemerintah Thailand untuk mewujudkan kebijakan legalitas *LGBT Rights* melalui *gender equality act* B.E 2558 pada tahun 2015. Konsep *domestic cultural values* juga menunjukkan keberhasilan penerimaan masyarakat Thailand terhadap kebijakan *LGBT Rights* karena memiliki keselarasan nilai dan norma kepercayaan dengan agama Buddha. Nilai dan norma kepercayaan bertoleransi terhadap LGBT yang sempat terpresi dapat muncul kembali di tengah masyarakat Thailand.

Kata kunci: hak LGBT, Thailand, jaringan advokasi transnasional, kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas isu LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*) yang semakin meningkat dan banyak diperbincangkan di Asia khususnya Thailand pada abad ke-19. Peningkatan isu ini ditandai dengan munculnya banyak komunitas LGBT di tengah masyarakat.

Keberadaan komunitas LGBT ini memunculkan tindakan diskriminasi dari masyarakat karena mereka menganggap LGBT sebagai kondisi abnormal dari seseorang (Reynold, 2007). Bahkan, di antara negara Asia Tenggara, masyarakat Thailand yang dianggap sudah familiar dengan isu ini pun

tidak dapat lepas dari kasus diskriminasi tersebut. Menurut Peter A. Jackson, hal ini terjadi sebagai dampak dari *Thai queer boom* atau ledakan identitas seksual kaum LGBT (Jackson, 2011). Menurut Jackson, dampak ledakan identitas kaum LGBT di Thailand ini memiliki dimensi gelap, yaitu menyebabkan dampak sosial yang buruk bagi kaum LGBT berupa tumbuh suburnya tindakan diskriminasi dari segala aspek. Selain itu, perubahan sistem politik pemerintahan Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional juga mendukung tindakan diskriminasi tersebut (Jackson, 2011). Sistem politik pemerintahan Thailand yang berbentuk monarki konstitusional sangat menentang perilaku kaum LGBT karena dianggap sebagai perilaku menyimpang dan mengganggu modernisasi Thailand. Padahal dalam sejarahnya, saat berbentuk monarki absolut, Thailand memegang kepercayaan Buddha yang kuat. Kepercayaan ini meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu pria, wanita, dan hermaphrodit yang bisa berupa wanita atau pria (Matzner, 2002). Kepercayaan ini juga menyebabkan masyarakat saat itu menerima manusia yang secara seksualitas berbeda. Namun, kepercayaan ini berubah diikuti oleh perubahan konstruksi sosial masyarakat yang berakibat kurang adanya penerimaan terhadap kaum LGBT oleh masyarakat Thailand.

Permasalahan kaum LGBT di Thailand telah menarik perhatian sejumlah aktor non pemerintah yang berfokus pada isu hak asasi manusia khususnya kaum LGBT seperti *Rainbow Sky Association*, *Purple Sky*, *Foundation for SOGI Rights and Justice (FOR-SOGI)*, dan *Anjana Suvarnananda*. Tujuan dari lembaga-lembaga tersebut adalah mendorong adanya kebijakan *LGBT Rights*, yang melindungi kaum LGBT dari berbagai tindakan diskriminasi oleh masyarakat Thailand (UNDP & USAID, 2014). Aktor-aktor non pemerintahan tersebut kemudian membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional yang berupaya mencapai tujuan tersebut. Jaringan advokasi ini menggunakan berbagai upaya berdasarkan *boomerang pattern* untuk mencapai keberhasilannya. Selain itu, keberhasilan jaringan advokasi ini semakin lengkap dengan adanya kemunculan kembali nilai dan norma ajaran Buddha yang sempat terpres. Masyarakat menerima kebijakan *LGBT Rights* karena menyadari kembali adanya keselarasan dengan nilai dan norma domestik mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin melihat bagaimana upaya *Transnational Advocacy Networks (TANs)* dalam isu LGBT di Thailand dapat mendorong legalitas *LGBT Rights* sehingga diterima oleh masyarakat Thailand. Upaya yang dilakukan oleh TANs dalam mewujudkan legalitas LGBT di Thailand menarik untuk dikaji, karena sejauh ini pembahasan mengenai LGBT di Thailand hanya berupa diskriminasi kaum LGBT di kehidupan sosialnya dan belum sampai pada legalisasi *LGBT Rights*. Upaya dari TANs ini juga didorong oleh penerimaan dari masyarakat yang kembali kepada kepercayaan Buddha mengenai kaum LGBT.

KERANGKA PEMIKIRAN

TANs merupakan sebuah jaringan advokasi yang memiliki peran sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap sebuah isu atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai tujuannya (Azizah, 2013). Jaringan ini memiliki peran penting dalam memengaruhi kepentingan dan kebijakan suatu negara (Kwak & Lee, 2009). Keck dan Sikkink mengklasifikasikan jaringan advokasi transnasional ini menjadi tujuh aktor utama, yaitu *non-government organizations (NGOs)* berskala domestik atau internasional, gerakan sosial tingkat lokal, yayasan dan media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan antarpemerintah, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999). Menurut Keck dan Sikkink, pada jaringan advokasi transnasional ini, pemerintah merupakan aktor penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ketika hubungan pemerintah dan masyarakat terhambat, di mana tertutupnya akses antara masyarakat dan pemerintah, maka akan terbentuk pola hubungan yang disebut '*boomerang pattern*'. Pola ini merupakan suatu strategi dari jaringan advokasi transnasional untuk mengubah perilaku negara. Terdapat empat cara dalam konsep *boomerang pattern* ini yaitu:

1. *Information politics*, kemampuan untuk memobilisasi informasi politik secara cepat dan kredibel yang berguna untuk menggerakkan target dengan mengirimkan informasi tersebut ke tempat yang mendapat pengaruh kuat.
2. *Symbolic politics*, kemampuan dalam menyampaikan

- secara simbolik, baik melalui tindakan atau narasi mengenai situasi yang sedang dialami untuk menarik perhatian masyarakat lain yang berada pada jarak jauh.
3. *Leverage politics*, kemampuan untuk menarik aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk memengaruhi situasi tertentu dan memperkuat jaringan yang memiliki kekuatan lebih lemah.
 4. *Accountability politics*, merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki kuasa lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan maupun prinsip-prinsip yang telah dibuat.

Dalam aplikasinya terhadap teori ini, jaringan advokasi transnasional untuk isu *LGBT Rights* di Thailand melakukan pergerakannya dengan menggunakan empat cara menurut konsep *boomerang pattern*. Hal ini dilakukan untuk menekan pemerintah Thailand yang kurang memberikan perhatian dan cenderung mengabaikan isu LGBT ini. Pemerintah Thailand menutup akses bagi kaum LGBT dan para aktor non pemerintah untuk menyuarakan tuntutan mereka, oleh karena itu jaringan ini berusaha menekan pemerintah Thailand baik melalui dukungan aktor lokal maupun internasional. *Information politics* merupakan cara yang penting bagi jaringan advokasi dalam memobilisasi isu LGBT kepada masyarakat untuk menggerakkan masyarakat lokal maupun internasional. Upaya TANs di Thailand untuk memobilisasi isu LGBT ini dapat dilihat melalui cara ini, di mana TANs di Thailand menggunakan media massa dan internet untuk membantu upaya mereka. Merujuk tulisan dari Marisa King yang berjudul *Cooptation or Cooperation: The Role of Transnational Advocacy Organizations in The Zapatista Movement* (King, 2004), terlihat bagaimana sarana media massa dan internet digunakan oleh jaringan advokasi untuk menggerakkan masyarakat. Jaringan advokasi zapatista merupakan jaringan berbasis internet yang memanfaatkan kemajuan teknologi, di mana menjadi pusat dari gerakan untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada penduduk Chiapas, Meksiko.

Kemudian, cara *symbolic politics* digunakan untuk melihat berbagai aksi jaringan advokasi transnasional di Thailand baik itu acara parade ataupun demonstrasi sebagai simbol perjuangan mereka dan membantu

penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan jaringan advokasi sendiri harus mampu menyampaikan informasi secara dramatis dan teknis (Keck & Sikkink, 1999). Selain itu, jaringan advokasi membentuk kerja sama dengan aktor di luar negaranya yang memiliki kuasa lebih besar untuk memperkuat pergerakan mereka. Hal ini dapat dilihat melalui cara *leverage politics*. Pada cara ini, jaringan advokasi memiliki pola komunikasi dan pertukaran, sukarela, dan timbal-balik (Dondoli, 2019). Pada setiap jaringan advokasi transnasional, terdapat hierarki yaitu aktor yang menjadi *gatekeepers* dan *peripheral NGOs* (Carpenter, 2011). Aktor yang menjadi *gatekeepers* biasanya adalah aktor yang memiliki pengaruh besar dalam penetapan standar norma dan nilai. Selain itu, *gatekeepers* adalah aktor yang memiliki kuasa kuat dengan anggaran besar dan staf profesional. Oleh karena itu, yang menjadi *gatekeepers* adalah organisasi internasional atau pemerintah (Carpenter, 2011). Di Thailand, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan badan-badan di bawahnya seperti *United Nations Development (UNDP)*, *International Labour Organization (ILO)*, dan *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)* menjadi *gatekeepers* dengan menyediakan fasilitas dan anggaran untuk mendukung setiap pergerakan jaringan advokasi dalam isu LGBT ini. *Accountability politics* sendiri digunakan untuk melihat bagaimana jaringan advokasi dan organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap kebijakan undang-undang *LGBT Rights* oleh pemerintah Thailand.

Pembahasan mengenai *LGBT Rights* di Thailand tidak hanya berhenti pada dikeluarkannya undang-undang *LGBT Rights*. Namun, penerimaan masyarakat Thailand terhadap undang-undang tersebut juga penting untuk dibahas. Hal ini berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat Thailand terhadap kaum LGBT, bagaimana konstruksi sosial masyarakat Thailand mampu kembali untuk menerima kaum LGBT sesuai dengan norma dan nilai dalam ajaran Buddha. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat ini dijelaskan melalui konsep yang dikemukakan oleh Cortell dan Davis mengenai konsep *domestic cultural values*.

Norma internasional dalam suatu kebijakan yang memiliki kecocokan dengan norma domestik suatu negara disebut sebagai *cultural match* atau keselarasan kultural (Cortell & Davis, 2002). Keselarasan kultural ini

merupakan keadaan di mana ketentuan yang terkandung pada norma internasional bersifat konvergen dengan norma domestik, hal ini terlihat pada sistem hukum dan birokrasi negara. Oleh karena itu, apabila norma internasional dapat diterapkan dalam ranah domestik, maka ketentuan yang terdapat di dalamnya harus memiliki keselarasan dengan norma domestik pada masyarakat. Berdasarkan konsep dari Cortell dan Davis, perilaku ataupun penerimaan masyarakat Thailand terhadap legalisasi *LGBT Rights* oleh pemerintah Thailand melalui dorongan dari TANs dan organisasi internasional dapat dianalisis menggunakan konsep ini. Perilaku ataupun penerimaan masyarakat Thailand dapat dilihat melalui adanya keselarasan norma internasional dan domestik.

HASIL DAN ANALISIS

SEJARAH KEPERCAYAAN HOMOSEKSUAL DI THAILAND

Thailand merupakan salah satu negara yang menganut kepercayaan Buddha yang menjadi agama mayoritas di negara ini. Kepercayaan ini memengaruhi nilai-nilai di dalam sistem konstitusi Thailand yang berbentuk Monarki Absolut hingga abad ke-19. Selama periode Monarki Absolut ini sekitar abad ke-14, perilaku seksual yang bertentangan dengan norma heteroseksual mulai berkembang di tengah masyarakat yang ditandai dengan budaya homoseksual di lingkungan kerajaan Thailand. Tidak hanya itu saja, budaya ini berkembang karena adanya faktor mitologi Buddha. Pada tahun 1991, Anatole-Roger Peltier menerbitkan sebuah terjemahan *Pathamamulamuli* yang merupakan sebuah mitologi Buddha tentang penciptaan manusia (Thailand Utara) (Matzner, 2002). Melalui terjemahannya, Peltier mengungkapkan bahwa menurut kepercayaan Buddha manusia terdiri dari tiga jenis yaitu, laki-laki, perempuan, dan hermaphrodit. Jenis kelamin ketiga yaitu hermaphrodit dapat pula disebut dengan transgender. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi awal munculnya istilah *kathoey*, yang merujuk pada transgenderisme atau dapat menjadi laki-laki maupun perempuan (Beyrer, 1998).

Selama abad ke-19, masyarakat Thailand cenderung lebih androgini terkait dengan gaya berpakaian dan gaya rambut. Memasuki abad ke-20, Thailand beralih dari sistem pemerintahan monarki absolut ke monarki konstitusional.

Perubahan sistem pemerintahan ini terjadi pada tahun 1932, yang ditandai adanya kudeta militer sebagai respon atas depresi ekonomi yang melanda Thailand saat itu. Kudeta tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Raja Prajadiphok, dan menjadi titik masuknya militer ke dalam pemerintahan (Handley, 2006). Pada abad ke-20 ini pula, kultur budaya toleransi terhadap perilaku homoseksual berubah seiring dengan pergantian sistem pemerintahan Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Perubahan sistem ini telah menyebabkan adanya tekanan dari kekuatan kolonialisasi barat yang mendorong penguasa elite Thailand untuk memulai proyek westernisasi yang diawali dengan identitas seksual dan gender.

Pemerintah Thailand mengubah perilaku seksual dan identitas seksual masyarakat Thailand (Harrison & Jackson, 2010). Pemerintah mengubah gaya berpakaian dan gaya rambut masyarakat sesuai dengan gender mereka. Perempuan diharuskan menggunakan rok, sedangkan pria mengenakan celana panjang. Hal ini dilakukan untuk menekan identitas LGBT masyarakat Thailand. Dalam proyek westernisasi di masa pemerintah monarki konstitusional ini, segala sesuatu harus bersifat 'normal' sesuai dengan aturan baku. Sehingga perilaku kaum LGBT yang dianggap abnormal atau menyimpang harus dihindari karena menghambat proses modernisasi Thailand. Dalam kaitannya dengan perilaku seksual, pada saat kolonialisasi ini memunculkan konsep homonormativitas yang berhubungan dengan *gay* dan *queer* (Walks, 2014). Di Thailand, kolonialisasi barat ini sangat memengaruhi berkembangnya homofobia di kalangan masyarakat. Hal ini berakibat pada perubahan konstruksi masyarakat Thailand yang kemudian menyebabkan banyak diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT.

PERUBAHAN KEPERCAYAAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP KAUM LGBT

Modernisasi yang dilakukan oleh Thailand melalui sistem pemerintahan baru berupa monarki konstitusional, menimbulkan perubahan pandangan masyarakat mengenai kaum LGBT. Perubahan pandangan ini menyebabkan kaum LGBT terdiskriminasi secara sosial ekonomi karena dianggap sebagai perilaku menyimpang. Hal ini diperparah dengan peningkatan pemberitaan mengenai kaum LGBT

oleh media yang sensasional. Selanjutnya, isu HIV/AIDS juga semakin memperburuk kekhawatiran masyarakat Thailand terhadap kaum LGBT. HIV/AIDS oleh mayoritas masyarakat diyakini sebagai penyakit kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit HIV/AIDS dikaitkan dengan perilaku homoseksual masyarakat. Epidemio HIV/AIDS dikalangan MSM (*men who have sex with men*) Thailand dimulai sejak tahun 1984 dan terus meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan prevalensi dari 0% hingga 49% dalam satu tahun (WHO, 2010).

EKONOMI

Di Thailand, kaum LGBT tidak mendapatkan akses bagi pemenuhan ekonomi mereka terutama dalam hal pekerjaan. Kaum LGBT mendapatkan diskriminasi pada semua tahapan pekerjaan, dimulai dari pendidikan, pelatihan, akses ke pekerjaan, peluang karir, serta tunjangan pekerjaan bagi keamanan sosial. Kaum LGBT akan segera ditolak oleh badan pemerintah maupun swasta ketika melihat identitas mereka yang dianggap tidak pantas dan tidak jelas seperti kelompok transgender. Dalam lingkungan kerja, kaum ini mendapatkan penghinaan, pelecehan, terabaikan oleh rekan-rekan kerja, dan jarang menerima dukungan promosi jabatan, serta mendapat bayaran yang tidak setara (CEDAW, 2017).

SOSIAL DAN BUDAYA

Pelecehan seksual merupakan hal yang sering didapatkan oleh kaum LGBT dalam kehidupan mereka. Pelecehan ini meliputi pelecehan verbal (penghinaan, komentar mengejek, perpeloncoan dan intimidasi di sekolah) maupun fisik (sentuhan yang tidak pantas dari laki-laki dan perempuan, diraba-raba, dan pemerkosaan) (Sabpaitoon, 2018). Diskriminasi dalam lingkungan pendidikan ini meliputi segala bentuk baik itu sistem penerimaan sekolah, peraturan sekolah dan universitas, ujian dan *grading*, upacara kelulusan sekolah dan universitas, maupun buku-buku sekolah yang dipublikasikan oleh pemerintah dan swasta di semua tingkat pendidikan (CEDAW, 2017). Tenaga pengajar dan antarsiswa juga ikut serta melakukan tindakan diskriminasi. Mereka memperlakukan siswa yang LGBT dengan sarkasme dan menekan mereka untuk berhenti menjadi LGBT.

Selanjutnya, dalam pelatihan militer, kaum LGBT juga mendapatkan diskriminasi yang tidak bertanggung jawab dari para personel militer. Kelompok gay feminim mendapat perlakuan berbeda dengan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan perempuan (CEDAW, 2017). Pekerjaan itu seperti memasak, membersihkan dapur, mencuci pakaian, dan dibebaskan dari pelatihan berat. Mereka di tempatkan pada unit yang berbeda untuk mengerjakan tugas 'perempuan' tersebut. Tetapi, pelecehan seksual tertinggi terjadi pada kaum LGBT saat pelatihan militer. Personel militer telah bersekongkol untuk melakukan tindakan seksual tersebut. Kaum LGBT ini khususnya wanita transgender dipaksa untuk bertelanjang bersama laki-laki dan diarak dalam kamp wajib militer. Lebih dari itu, mereka mendapatkan penyerangan dan pemerkosaan oleh pelatih militer mereka.

JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL TERHADAP ISU LGBT RIGHTS DI THAILAND

Tumbuh suburnya perilaku diskriminasi dan kriminalisasi ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Thailand yang justru menyudutkan kaum LGBT. Ini dikarenakan perubahan sistem pemerintahan baru memiliki kebijakan yang secara tidak langsung menghilangkan kepercayaan sebelumnya mengenai tiga jenis gender dan seks. Kaum LGBT untuk wanita diperkirakan berjumlah 300.000 yang tinggal di Thailand, sedangkan untuk pria sekitar 30.000 orang (Winter, 2009). Hal ini kemudian menjadi keprihatinan bagi NGO di Thailand yang memang fokus pada isu hak asasi manusia. Para NGO ini kemudian membangun sebuah jaringan yang sifatnya transnasional untuk membantu perjuangan mereka. Jaringan advokasi transnasional di Thailand mengedepankan isu hak asasi manusia untuk kaum LGBT. Mereka menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi yang diterima kaum LGBT. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua masyarakat Thailand. Pada kasus Thailand, jaringan advokasi transnasional ini melakukan pergerakan yang dimulai dari level lokal dengan langsung terjun ke masyarakat melalui cara-cara persuasif, hingga ke level internasional dengan menarik dukungan organisasi internasional di luar negara Thailand.

INFORMATION POLITICS

Information Politics atau politik informasi merupakan cara yang penting dalam sebuah kampanye jaringan advokasi. Informasi merupakan hal fundamental bagi keberhasilan sebuah jaringan advokasi yang sifatnya transnasional. Keck dan Sikkink berpendapat bahwa kemampuan untuk menghasilkan informasi secara efektif dan efisien merupakan *'the most valuable trading currency'* pada jaringan advokasi transnasional (Silva, 2007). Cara politik informasi ini harus dapat diandalkan dan menarik perhatian masyarakat atas isu yang dibawa oleh jaringan tersebut.

Dalam kasus Thailand, jaringan advokasi pada isu *LGBT Rights* yang terdiri dari beberapa NGO melakukan cara politik informasi dengan terjun langsung ke masyarakat dan melalui media. Media sendiri adalah alat penting bagi keberhasilan pendistribusian informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa NGO seperti *Anjaree Foundation*, *Rainbow Sky Association of Thailand* (RSAT), dan *Purple Sky Network* (PSN), melakukan politik informasi dengan memberikan pengetahuan mengenai orientasi seksual dan identitas gender kepada masyarakat baik melalui kampanye, penerjunan perwakilan setiap NGO ke masyarakat, melalui brosur-brosur yang disebar-kan, media massa, ataupun internet (UNDP & USAID, 2014). Penggunaan internet yang merupakan bentuk revolusi teknologi digunakan sebagai media daring yang menjadi sarana bagi jaringan advokasi dalam politik informasi cukup efektif. Media daring seperti Youtube membuat narasi tentang isu LGBT lebih menarik, sehingga informasi identitas keragaman seksual tersampaikan dengan baik (Pullen & Cooper, 2010). *Tom Act* yang merupakan majalah pertama untuk kaum LGBT di Thailand juga membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Jackson, 2011). Selain itu, mereka menggali informasi dengan melakukan penelitian dengan cara pembagian kuesioner kepada masyarakat, dan untuk kasus HIV/AIDS kaum LGBT mereka melakukan pengecekan langsung. Informasi yang mereka dapatkan ini menjadi sumber bagi perjuangan mereka.

Anjaree Foundation sendiri memiliki tujuan utama mempromosikan keadilan dan kesetaraan mengenai isu-isu gender dan seksualitas dalam masyarakat Thailand

(Anjaree, 2014). *Anjaree Foundation* menjadi organisasi pertama yang mengampanyekan isu hak asasi manusia untuk kaum LGBT. Selanjutnya, *Rainbow Sky Association of Thailand* (RSAT) dan *Purple Sky Network* mewakili jaringan advokasi ini dalam aspek kesehatan bagi kaum LGBT terutama pada kasus HIV/AIDS di kalangan LGBT. Di Thailand, sekitar 52.000 orang dengan rentang usia 15-49 hidup dengan penyakit HIV/AIDS (WHO, 2012). *Rainbow Club* dipelopori oleh Mr. Kamol Settayakarn yang merupakan seorang aktivis sosial dan kesehatan, mendorong kelompok pekerja seks yang merupakan kaum LGBT untuk melakukan kegiatan bermanfaat dalam *'Rainbow Path Club'*. Bentuk kegiatan tersebut seperti memberikan informasi tentang penyakit HIV/AIDS, pencegahan dan distribusi alat kontrasepsi kepada pekerja seks laki-laki, serta bekerja sama dengan palang merah Thailand untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut (RSAT, 2018). *Rainbow Sky Association of Thailand* (RSAT) dalam melaksanakan programnya lebih mencakup wilayah nasional di Thailand (RSAT, 2018), sedangkan *Purple Sky Network* (PSN) menjalankan programnya lebih berfokus pada subregion Mekong Raya. *Purple Sky Network* merupakan sebuah organisasi non-profit yang berdiri sejak tahun 2006. Organisasi ini terdiri dari beberapa jaringan kelompok teknis nasional dan provinsi yang berupaya mengadvokasi prioritas pencegahan dan perawatan terkait dengan penyakit HIV/AIDS kaum LGBT di Thailand (PurpleSky, 2010).

SYMBOLIC POLITICS

Cara atau strategi kedua yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional adalah *symbolic politics* atau politik simbolik. Strategi ini menurut Keck dan Sikkink muncul ketika peristiwa-peristiwa penting terjadi dan dibingkai secara simbolik untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dan memperluas fondasi jaringan tersebut (Keck & Sikkink, 1999). Jaringan advokasi melakukan perjuangannya dengan menggunakan berbagai simbol-simbol atau tanda-tanda, aksi-aksi, dan cerita tertentu demi menghimpun keyakinan maupun dukungan dari masyarakat. Strategi ini digunakan untuk menysar dan menarik perhatian pihak-pihak yang posisinya jauh (Silva, 2007).

RSAT yang termasuk salah satu NGO dalam jaringan advokasi ini melakukan aksi protes dengan cara memboikot salah satu hotel di Thailand yang diskriminatif terhadap LGBT. Pada tahun 2007, *Rainbow Sky* melakukan aksi pemboikotan terhadap *Accor Hotels* setelah seorang transgender mendapatkan diskriminasi berupa pelarangan masuk ke dalam klub Novotel Hotel di Bangkok (Sanders, 2011). *Rainbow Sky* dengan salah seorang aktivis yaitu Sutthirat Simsiriwong, mengajukan protes kepada *National Human Rights Commissioner* di Thailand. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan permintaan maaf dari manajemen hotel dan pemboikotan tersebut dihentikan.

Kemudian, NGO lain seperti FOR-SOGI *Rights* juga melakukan cara politik simbolik dengan mengadakan acara *Gay Pride Parade* yang merupakan awal bagi terbentuknya NGO tersebut. Secara umum, FOR-SOGI memiliki tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak seksual dan gender. FOR-SOGI berfokus pada isu perlindungan dan kesetaraan kaum LGBT Thailand (FOR-SOGI, 2018). Kemudian juga, untuk mendorong kebijakan publik dan hukum yang melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan seksualitas dan gender (Barrow & Chia, 2016). Organisasi ini juga dalam tujuannya mencoba untuk tidak terlibat dengan segala urusan politik di Thailand.

LEVERAGE POLITICS

Kedua cara atau strategi seperti *information politics* dan *symbolic politics* dalam perjalanannya dirasa kurang efektif untuk menarik perhatian pemerintah Thailand. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka tindakan diskriminasi dan kriminalisasi kaum LGBT baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Jaringan advokasi atau TANs ini mengalami hambatan ketika dihadapkan pada aspek struktural yang berkaitan dengan peraturan dan hukum yang seringkali mengkriminalisasi kaum LGBT ini. Kegagalan untuk terlibat dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan di pemerintahan Thailand juga menjadi faktor kurang maksimalnya upaya yang dikerjakan oleh TANs ini. Oleh karena itu, jaringan advokasi ini menggunakan cara ketiga yang dinilai lebih efektif yaitu *leverage politics*.

Leverage politics adalah suatu cara atau strategi dengan

mendorong keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih kuat untuk memengaruhi suatu kebijakan negara, dan menguatkan pergerakan jaringan advokasi transnasional tersebut (Keck & Sikkink, 1999). Menurut Robert C. Blitt, penggunaan *leverage politics* yang efektif tergantung pada kemampuan jaringan dalam menekan dan memengaruhi aktor yang ditargetkan untuk mengubah perilakunya. Ada jenis *leverage politics* yaitu material (*material leverage*) dan moral (*moral leverage*). Material dapat berupa uang, barang, atau berbagai macam keuntungan lainnya. Sedangkan, moral merujuk pada '*mobilization of shame*', yang mana menempatkan perilaku aktor yang menjadi target sebagai pusat perhatian internasional (Blitt, 2004). Pada jaringan advokasi transnasional di Thailand, material maupun moral digunakan oleh jaringan ini untuk menarik perhatian dari organisasi internasional yang menjadi targetnya. Pengaruh material bagi pemerintah Thailand sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ekonomi dan penanganan kasus *LGBT Rights*. Selain itu, pengaruh moral yang digunakan oleh jaringan advokasi ini adalah dalam konteks hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan resolusi pertama Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengenai pengakuan terhadap hak-hak kaum LGBT (Holzhacker, 2014).

Pengaruh moral inilah yang menjadi landasan bagi jaringan advokasi untuk mendekati aktor-aktor kuat dalam hubungan internasional. Jaringan advokasi ini berhasil menarik perhatian dari organisasi internasional seperti UNDP, *U.S. Agency for International Development* (USAID), ILO, *World Health Organization* (WHO) dan ILGA. UNDP merupakan organisasi di bawah PBB yang menangani isu kesejahteraan dan kebebasan kehidupan setiap manusia. Dalam kaitannya dengan masalah homophobia yang terjadi di tengah masyarakat global, UNDP berkomitmen untuk menangani hal tersebut dan meningkatkan kehidupan kaum LGBT. UNDP memiliki sebuah program dalam bingkai '*Being LGBT in Asia*' yang mengampanyekan dukungan terhadap kaum LGBT di Asia (UNDP & USAID, 2014). UNDP juga berperan serta dalam menyukseskan salah satu program yang menjadi tujuan pembangunan yaitu, *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs mengandung agenda-agenda pembangunan, di mana salah satunya terdapat agenda *gender equality*. Agenda pembangu-

nan *gender equality* memuat artian bahwa dalam proses pembangunan tidak ada yang terpinggirkan termasuk kaum LGBT (Stonewall, 2018). Agenda pembangunan inilah yang menjadi acuan bagi UNDP untuk memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, politik, terlepas dari usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau status ekonomi lainnya.

Dalam menjalankan program '*Being LGBT in Asia*', UNDP juga bekerja sama dengan USAID dan NGO yang tersebar di setiap negara tujuan. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif. USAID sendiri merupakan badan pembangunan yang didirikan oleh John F. Kennedy pada tahun 1961 (USAID, 2001). USAID didanai langsung oleh federal Amerika Serikat dalam menjalankan programnya. Tujuan USAID adalah mendemokratisasi proses pembangunan di Amerika dan seluruh dunia untuk keberlanjutan kehidupan manusia (USAID, 2001). Kasus diskriminasi dan kriminalisasi kaum LGBT di Thailand merupakan permasalahan yang menghambat bagi keberlanjutan kehidupan, karena itu USAID memiliki perhatian untuk membantu menuntaskan kasus tersebut. Di Thailand, UNDP dan USAID merupakan sumber pendanaan utama bagi segala upaya untuk mendorong terciptanya *LGBT Rights*. Untuk membuktikan komitmennya mendukung kaum LGBT, UNDP dan USAID menggelontorkan dana sebesar US\$86.511.000 (UNDP, 2016).

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh UNDP, USAID dan NGO di Thailand terkait reformasi undang-undang terhadap kaum LGBT, ILO mendukung upaya tersebut dengan ikut terlibat di dalamnya. ILO yang memfokuskan pada reformasi undang-undang terhadap pekerja di Thailand, mendorong adanya perubahan undang-undang di Thailand yang lebih beragam dengan keragaman orientasi seksual maupun identitas gender para pekerja (Suriyasarn, 2016). Berdasarkan data dari ILO, Thailand tercatat belum meratifikasi konvensi diskriminasi *Employment and Occupation* 1958 No. 111, dalam perlindungan ketenagakerjaan. Padahal konvensi ini mewakili salah satu prinsip dasar dan hak di tempat kerja. Keterlibatan ILO ini juga memiliki tujuan untuk mencapai proyek ILO yaitu *promoting rights, diversity and equality in the world of work* (PRIDE), dengan dukungan pula dari pemerintah

Norwegia (UNDP & USAID, 2014).

ILGA adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1978 di Coventry, Inggris. Organisasi ILGA ini memiliki kantor pusat di Swiss, untuk memudahkan pengorganisasian dan mengakomodir negara anggota. ILGA sangat peduli terhadap kaum LGBT (Halim, 2015). ILGA sendiri merupakan organisasi internasional yang terdiri dari sekitar 1.100 anggota organisasi dengan 110 negara anggota yang mengkampanyekan *LGBT Rights*. Dalam struktur kesekretariatan ILGA terbagi menjadi dua bentuk dengan wilayah program yang berbeda yaitu *Women's Secretariat (gay, lesbian)* dan *Trans Secretariat (trans dan interseksual)*. Kemudian, untuk mencapai tujuannya secara menyeluruh, ILGA juga bekerja sama dengan PBB. Isu *LGBT Rights* di Thailand adalah isu yang ikut diperjuangkan pula oleh ILGA. Hal ini sesuai dengan program dari ILGA Asia yang berbasis di Bangkok, dalam menjamin kehidupan kaum LGBT yang bebas dari diskriminasi. ILGA berperan penting bagi jaringan advokasi di Thailand dalam memfasilitasi pertemuan para NGO untuk membahas segala upaya proses legalisasi *LGBT Rights*.

WHO juga mendorong bekerja sama dengan TANS untuk membantu WHO sendiri dalam proyek kesehatan di Thailand khususnya HIV/AIDS yang menyangkut kaum LGBT ini. Kerja sama WHO dengan TANS terlihat dengan didirikannya *RSAT Health Center* pada tahun 2001, yang berfokus pada penanganan HIV/AIDS masyarakat Thailand (USAID, 2018). Tidak hanya dengan TANS saja, WHO juga menjalin kerja sama dengan industri kesehatan di Thailand yang mencakup tenaga kesehatan dan farmasi atau obat-obatan (UNAIDS, 2015). Tenaga kesehatan di Thailand diperbanyak untuk memudahkan penanganan kasus HIV/AIDS. Sedangkan untuk farmasi, WHO mendorong Thailand untuk memperbanyak pula jumlah obat-obatan generik untuk pencegahan HIV/AIDS. Tuntutan produksi obat-obatan ini telah membawa sebuah kepentingan industri obat-obatan di Thailand untuk terlibat dalam proyek legalitas *LGBT Rights* melalui naungan WHO.

Masuknya organisasi internasional melalui strategi *leverage politics* telah membawa kekuatan bagi jaringan advokasi ini untuk bernegosiasi menekan pemerintah

Thailand agar memberikan jaminan perlindungan kepada kaum LGBT. TANS untuk isu LGBT di Thailand bersama dengan organisasi internasional lainnya melakukan berbagai cara terutama melalui jalan negosiasi. Proses negosiasi perumusan legalitas undang-undang hak asasi terhadap kaum LGBT di Thailand dimulai sejak tahun 2007 (UNDP & USAID, 2014). Pada tahun 2007, proses negosiasi antara para NGO di Thailand yang dipimpin oleh *Anjaree Foundation* berlangsung dengan pemerintah Thailand yang membahas mengenai undang-undang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hasilnya, pemerintah Thailand mengeluarkan *The Criminal Code Amendment Act* (No. 19) B.E 2250 yang dikeluarkan pada tahun 2007 (UNDP & USAID, 2014). Pemerintah Thailand memperluas definisi tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan bahwa pria dan wanita dapat menjadi korban, serta pemerintah juga melarang pemerkosaan dalam perkawinan.

Selanjutnya pada tahun 2010, para NGO ini juga mendesak pemerintah Thailand untuk menyetujui resolusi Majelis Umum PBB A/C.3/67/L.36 tentang pembunuhan ekstra yudisial, di mana memperkenalkan kembali orientasi seksual dan identitas gender ke dalamnya (UNDP & USAID, 2014). Perilaku kaum transgender atau *kathoe* dianggap *gender identity disorder* yang menyebabkan tumbuh suburnya tindakan diskriminasi di kamp-kamp pelatihan militer Thailand (Sanders, 2011). Pada bulan September 2011, para NGO yang tergabung ke dalam jaringan advokasi transnasional ini mendesak pemerintah Thailand melalui Kementerian Pertahanan untuk membebaskan para transgender ini dari kewajiban militer. Mereka juga mendorong memasukkan transgender ke dalam *permanently mental ill* bukan pada *gender identity disorder* (UNDP & USAID, 2014).

Pada tahun 2013, diadakan pertemuan atau dialog untuk membahas rumusan undang-undang hak asasi manusia terhadap kaum LGBT. Pertemuan ini berlangsung di *United Nations Convention Centre*, Bangkok, Thailand pada bulan Maret 2013 (UNDP & USAID, 2014). Pertemuan ini dihadiri oleh 45 peserta yang terdiri dari para NGO di Thailand, Komisi Hak Asasi Manusia Thailand, organisasi bantuan hukum, perwakilan universitas, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pertemuan ini meninjau mengenai lingkungan hukum dan sosial yang dihadapi oleh

kaum LGBT di Thailand dengan tujuan memudahkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan undang-undang *LGBT Rights*. Setelah melewati proses dialog yang memakan waktu lama, pertemuan ini menghasilkan rekomendasi dalam rumusan undang-undang kaum LGBT di Thailand yang meliputi *marriage law, employment and housing, education and young people, health and well-being, family and society*, serta *media informations*. Semua hal yang menjadi rekomendasi undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk menyukseskan program '*Being LGBT in Asia*' di Thailand yang diperkenalkan oleh UNDP (UNDP & USAID, 2014).

Pertemuan untuk menyempurnakan rumusan undang-undang *LGBT Rights* di Thailand berlanjut pada tahun 2014. ILO menjadi organisasi yang memfasilitasi pertemuan ini, karena pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai masalah ketenagakerjaan kaum LGBT di Thailand. Beragam bentuk diskriminasi yang diterima oleh para pekerja kaum LGBT di tempat kerja mereka memberikan keprihatinan bagi ILO untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 4 Juni 2014, diadakan pertemuan dalam bentuk seminar nasional yang dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan Thailand, NGOs, para peneliti, dan UN (Suriyarn, 2016). ILO mengenalkan program PRIDE yang merupakan sebuah program untuk mendukung kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi kaum LGBT dalam dunia kerja.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, perjuangan TANS di Thailand yang didukung oleh beberapa organisasi internasional lainnya mencapai keberhasilan dengan dikeluarkannya *Gender Equality Act* B.E 2558 pada 13 Maret 2015, dan disahkan oleh pemerintah Thailand pada 9 September 2015 (Adulyadej, 2015). *Legal Act* ini merupakan hukum pertama di Thailand yang secara langsung menyebutkan kaum LGBT di dalamnya. Melalui disahkannya undang-undang ini, pemerintah Thailand melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perbedaan dalam orientasi seksual dan identitas gender. Dalam undang-undang ini juga dikatakan bahwa segala tindakan diskriminasi baik kepada pria, wanita, maupun orang dengan perilaku seksual yang berbeda, dikenakan hukuman enam bulan penjara dan membayar denda sebesar 20.000 baht (Adulyadej, 2015).

ACCOUNTABILITY POLITICS

Accountability Politics atau politik akuntabilitas merupakan strategi dari jaringan advokasi untuk memantau komitmen negara terhadap kesepakatan yang telah dibuat agar tidak menyimpang (Blitt, 2004). Melalui cara ini jaringan advokasi dengan posisi yang dimilikinya memiliki peran untuk mengamati dan mengontrol jenjang di antara kesepakatan dan praktiknya, ketika aktor yang ditargetkan telah mengubah posisinya dalam suatu isu tertentu (Keck & Sikkink, 1999). Dalam kasus legalisasi *LGBT Rights* di Thailand, jaringan advokasi transnasional tersebut bersama dengan organisasi internasional lainnya terus berupaya untuk mengawasi dan mengontrol jalannya implementasi pemerintah Thailand melalui legalisasi *LGBT Rights* tersebut.

PERAN NILAI DAN NORMA TERHADAP LEGALITAS *LGBT RIGHTS*

Sejak dikeluarkannya *Gender Equality Act B.E 2558* oleh pemerintah Thailand pada 13 Maret 2015 hingga disahkan pada 9 September 2015, masyarakat Thailand tidak langsung menerima kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat bahwa perilaku LGBT merupakan hal menyimpang yang juga didukung oleh kebijakan-kebijakan di bawah rezim militer yang keras terhadap kaum LGBT. Anggapan inilah yang menyebabkan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat terdahulu. Maka, untuk mengimplementasikan kebijakan ini dalam masyarakat dibutuhkan adanya perubahan pola pikir mengenai kaum LGBT. Penerimaan masyarakat ini ditentukan oleh ada atau tidaknya kesamaan kebijakan tersebut dengan nilai dan norma masyarakat Thailand. Untuk memahami bagaimana peran nilai dan norma domestik yang mengubah pola pikir masyarakat Thailand terhadap LGBT, maka dapat dipahami melalui konsep *domestic cultural values* yang dikemukakan oleh Cortell dan Davis.

Suatu kebijakan yang diambil oleh sebuah negara mengandung serangkaian ide, kerangka pemikiran, dan asumsi, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat ini tergantung pada korelasi kebijakan terhadap nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat (Jackson & Sorensen, 2013). Cortell dan Davis dalam

konsep *domestic cultural values*, mengemukakan bahwa suatu kebijakan negara dapat diterima dalam wilayah domestik perlu sejalan dengan norma-norma domestik, kepercayaan, pemahaman domestik, dan kewajiban domestik secara luas. Kebijakan itu pula harus mengandung preskripsi yang selaras dengan budaya politik suatu negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, maka mereka akan cenderung untuk menyebarkannya, mengadopsi, dan memperkuat melalui kebijakan publik (Sato & Hirata, 2010). Apabila kebijakan yang terkandung dalam norma internasional memiliki kecocokan dengan norma domestik suatu negara, maka akan terjadi *cultural match* atau keselarasan kultural (Cortell & Davis, 2002). Ketika keselarasan kultural ini terjadi, masyarakat secara naluriah akan mengakui kebijakan tersebut dan secara otomatis akan menjalankan kewajiban kebijakan tersebut.

Penerimaan masyarakat terhadap *gender equality act* yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand dapat dilihat kepercayaan Buddha yang dianut oleh masyarakat tentang penciptaan manusia dalam cerita Pathamamulamuli (Peter, 2000). Cerita Pathamamulamuli termasuk ke dalam sejarah kepercayaan Dhammapada Atthakata pada ajaran Buddha yang mempercayai adanya tiga jenis seksualitas manusia yaitu pria, wanita, dan hermaphrodit. Hermaphrodit dikatakan dalam kepercayaan Buddha nantinya dapat berubah dari pria menjadi wanita atau sebaliknya dari wanita menjadi pria (Matzner, 2002). Secara lebih mendalam, budaya trans-seksual maupun homoseksualitas di Thailand dapat dipahami melalui kitab Vinayapitaka yang merupakan kitab agama Buddha. Di dalamnya menjelaskan mengenai toleransi dan pengakuan sang Buddha terhadap budaya tersebut (Horner, 1949). Kepercayaan tentang Dhammapada Atthakata yang telah dijelaskan sebelumnya berasal dari kitab Vinayapitaka ini. Kitab ini menjadi salah satu sumber utama mengenai aturan monastik Buddhic. Aturan ini berkenaan dengan kehidupan trans-seksual atau hubungan seksual bagi para bhikkhu dan bhikkhuni. Dalam kehidupan seksual ini, Sang Buddha melalui kepercayaannya memberikan toleransi kepada para bhikkhu dan bhikkhuni yang menjadi trans yaitu berubah dari pria menjadi wanita atau sebaliknya (Horner, 1949).

Pembahasan mengenai keselarasan nilai dan norma

tentang LGBT juga terdapat dalam sejarah kerajaan Siam pada masa pemerintahan sistem monarki absolut. Perilaku LGBT pada masa itu sudah menjadi budaya di dalam lingkungan kerajaan. Kepercayaan dan ajaran Buddha yang menjunjung toleransi terhadap segala bentuk perilaku seksual manusia menjadi pendorong membuminya kebudayaan LGBT. Dalam sejarahnya sendiri, perilaku LGBT didokumentasikan ke dalam sastra lama Thailand yang disebut dengan 'Samutta-khot Kham Chan' dari zaman Ayuttaya (Baker & Pongpaichit, 2009). Sastra tersebut menceritakan mengenai hubungan antara para selir yang berperilaku lesbian, dan juga tentang raja yang berperilaku LGBT (Jackson, 2003).

Berdasarkan hal ini, kepercayaan dalam agama Buddha yang dianut oleh masyarakat Thailand mengenai seksualitas dan gender menunjukkan adanya kongruensi atau keselarasan dengan kebijakan *gender equality act*. Kebijakan ini sendiri berisi pengakuan terhadap kaum LGBT di Thailand dan berisi perlindungan hukum terhadap semua tindakan diskriminatif kepada kaum LGBT tersebut. Isi dari kebijakan ini tentunya sejalan dengan ajaran Buddha untuk toleransi terhadap kaum LGBT, karena perilaku mereka adalah sebuah takdir dari Tuhan. Oleh karena itu, kehadiran kebijakan *gender equality act* ini tidak mendapatkan pertentangan dari masyarakat Thailand. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan *gender equality act* yang ditunjukkan karena adanya keselarasan dengan nilai dan norma dalam masyarakat ini dalam perkembangannya dibuktikan dengan diakuinya delapan belas seksualitas dan gender. Kehadiran delapan belas gender yang ada di Thailand merupakan wujud kekayaan gender yang merupakan hasil dari penerimaan masyarakat terhadap kaum LGBT. Kekayaan gender yang ada di Thailand ini merupakan perkembangan dari tiga jenis seksualitas dan gender yang telah ada sebelumnya menurut kepercayaan Buddha (Ojanen, 2009). Keselarasan nilai dan norma masyarakat pada kebijakan *gender equality act* telah membentuk sebuah kultur masyarakat yang toleransi terhadap kaum LGBT. Kultur ini juga merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat, sehingga kaum LGBT ini dapat mengekspresikan perilaku seksualitas mereka melalui beragam jenis gender (Ocha, 2013).

Kesadaran masyarakat terhadap kepercayaan Buddha ini tidak lepas dari adanya peran jaringan advokasi transnasional Thailand yang melakukan berbagai cara seperti *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Hal yang dilakukan oleh TANS tersebut dimaksudkan untuk memunculkan kembali nilai kepercayaan ajaran Buddha di dalam masyarakat yang teresresi akibat tekanan kebijakan modernisasi pemerintah Thailand di bawah sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kemunculan nilai tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan implementasi kebijakan legalitas *LGBT Rights* untuk seterusnya. Perubahan konstruksi sosial masyarakat ini digugat oleh jaringan advokasi Thailand yang menghendaki kembalinya sistem sosial dan budaya lama di Thailand. Menurut jaringan advokasi ini, meskipun Thailand melakukan modernisasi tidak boleh meninggalkan tradisi lama yang berakar dalam masyarakat karena akan menimbulkan permasalahan terutama bagi kaum LGBT yang dianggap tidak layak dalam dunia yang modern tersebut. Masyarakat Thailand juga harus memegang kuat kepercayaan Buddha yang meyakini untuk berperilaku toleransi terhadap segala perbedaan baik itu agama, tradisi budaya, adat istiadat, dan juga prinsip dasar ajaran Buddha untuk menghormati orang lain (McCargo, 2012). Untuk itu, jaringan advokasi transnasional memiliki peran yang cukup diperhitungkan dalam membantu menyelaraskan kembali konstruksi sosial dalam masyarakat.

Adanya keselarasan atau kongruensi antara kebijakan legalitas *LGBT Rights* dengan nilai dan norma dalam masyarakat Thailand, telah berdampak pada dukungan masyarakat terhadap pemerintah Thailand untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Thailand untuk mengembangkan sektor pariwisata. Para kaum LGBT ini dikelola oleh pemerintah sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan tersebut, di mana hal ini juga sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas hidup kaum LGBT dari segi ekonomi. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Thailand sebagai sarana untuk peningkatan kehidupan kaum LGBT adalah dengan memberikan pekerjaan. Pemerintah Thailand mengelola kaum LGBT, khususnya para transgender atau *kathoe* dengan cara menjadikan mereka sebagai objek pariwisata negara Thailand. Selain itu, pemerintah Thai-

land membuat suatu komite nasional untuk mengurus persoalan kaum LGBT dan juga sebagai komite resmi negara dalam pengelolaan dana khusus bagi kaum LGBT (MSDHS & UNDP, 2018).

Jumlah *kathoe*y yang cukup banyak dimanfaatkan oleh pemerintah Thailand untuk *branding* pariwisatanya (Ocha, 2013). Pada tahun 2015, jumlah *kathoe*y atau kelompok transgender ini sekitar 10.000 hingga 100.000 dari total jumlah penduduk Thailand yang berjumlah 67.741.401 jiwa (CIA, 2018). Ketika negara lain menggunakan satu gender saja, yaitu wanita atau pria dalam sektor pariwisata, Thailand justru menggunakan kaum LGBT sebagai *branding* pariwisata Thailand. Kaum LGBT mendapatkan perlakuan sama dan dikelola dengan baik oleh pemerintah sebagai daya tarik wisata bagi turis dalam maupun luar negeri. Kaum LGBT terutama *kathoe*y atau *lady boys* di tempatkan pada sektor wisata malam Thailand. *Night Tourism* merupakan kategori wisata yang menawarkan pertunjukan-pertunjukan menarik yang dapat disaksikan pada malam hari, seperti pertunjukan musik dan seni, serta wisata seks bagi wisatawan (Robinson, Heitmann, & Dieke, 2011). Titik pariwisata yang menjadi rujukan oleh pemerintah adalah wisata malam khususnya di Bangkok, Chiangmai, dan Pattaya, yang mana banyak kaum LGBT di daerah tersebut. Berbicara mengenai sektor pariwisata Thailand yang mengedepankan 'sex tourism' terutama para kaum LGBT, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak dikeluarkannya kebijakan *gender equality act* pada tahun 2015. Pada tahun 2015 hingga 2017, *World Bank* di Thailand melaporkan dalam bentuk *Thailand Economic Monitor* bahwa terjadi peningkatan sebesar 8,9 persen pada sektor pariwisata di Thailand (Worldbank, 2017).

KESIMPULAN

Perubahan sistem pemerintahan Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional berdampak pada terpresinya kepercayaan ajaran agama Buddha yang toleransi terhadap perilaku seksual kaum LGBT. Hal ini menyebabkan tingginya angka diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT di negara tersebut. Oleh karena itu, jaringan advokasi transnasional di Thailand mendorong legalitas *LGBT Rights* untuk melindungi kaum LGBT dari tindakan diskriminasi ini. Melalui empat cara

dalam konsep *boomerang pattern* yang dikemukakan oleh Keck & Sikkink yaitu, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, jaringan advokasi ini mampu mencapai keberhasilan dengan dikeluarkannya kebijakan *Gender Equality Act* B.E 2558 oleh pemerintah Thailand. Selain itu, kebijakan tersebut pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat Thailand karena selaras dengan nilai dan norma kepercayaan agama Buddha untuk toleransi terhadap kaum LGBT. Keselarasan ini membawa perubahan kembali dalam konstruksi masyarakat mengenai kaum LGBT. Masyarakat mulai menerima dan toleran terhadap perilaku seksual kaum LGBT tersebut. Penerimaan masyarakat ini karena upaya TANs untuk memunculkan kembali kepercayaan ajaran agama Buddha yang toleransi terhadap kaum LGBT yang sebelumnya terpresi akibat perubahan sistem pemerintahan Thailand.

REFERENSI

- Adulyadej, H. K. (2015). *Gender Equality Act*. Thailand: Government of Thailand.
- Anjaree. (2014, May 17). *How Anjaree Comes About (History of Anjaree)*. Diambil kembali dari Anjaree Thailand: <https://web.archive.org/web/20140517120810/http://anjaree.org/11001.html>
- Baker, C., & Pongpaichit, P. (2009). The Career of Khun Chang Khun Phaen. *Journal of the Siam Society*, Vol. 97, 1-42.
- Barrow, A., & Chia, J. L. (2016). *Gender, Violence, and The State in Asia*. New York: Routledge.
- Beyrer, C. (1998). *War in the Blood: Sex, Politics, and AIDS in Southeast Asia*. London: Zed Books.
- Blitt, R. C. (2004). Who Will Watch the Watchdogs? Human Rights Nongovernmental Organizations and the Case for Regulation. *Buffalo Human Rights Law Review*, Vol. 10, 261-398.
- Carpenter, R. C. (2011). *Governing the Global Agenda: "Gatekeepers" and "Issue Adoption" in Transnational Advocacy Networks*. Washington D.C: Cambridge University press.
- CEDAW. (2017). *THAILAND: Discrimination and Violence Against Women and LGBTI Persons*. Thailand: Togetherness For Equality (TEA).
- CIA. (2018, Desember 18). *The World Factbook: Thailand*. Diambil kembali dari Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>
- Cortell, A. P., & Davis, J. W. (2002). Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda. *International Studies Review*, Vol. 2, No. 1, 65-87.
- Dondoli, G. (2019). *Transnational Advocacy Network and Human Rights Law: Emergence and Framing of Gender Identity and Sexual Orientation*. New York: Routledge.
- FOR-SOGI. (2018, September 14). *Background of the Foundation for Gender Rights and Gender Equality*. Diambil kembali dari FOR-SOGI: <http://forsogi.org>

- Halim, A. (2015). Diskriminasi yang Melatarbelakangi ILGA dalam Upaya Pengakuan Hak-hak LGBT dari PBB. *Andalas Journal of International Studies*, Vol.4, No.2, 201-219.
- Handley, P. M. (2006). *The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej*. New Heaven & London: Yale University Press.
- Harrison, R. V., & Jackson, P. A. (2010). The Ambiguous Allure of the West: Traces of the Colonial in Thailand. Dalam D. Chakrabarty. Hongkong: Hongkong University Press.
- Holzhaecker, R. (2014). *Gay Rights are Human Rights*. Groningen: University of Groningen.
- Horner, I. B. (1949). *The Book of the Discipline (Vinaya-Pitaka): Vol. 1*. London: Pali Text Society by Luzac & Co.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational advocacy networks in international and regional politics*. Oxford: Blackwell Publishers.
- King, M. (2004). Cooptation or Cooperation: The Role of Transnational Advocacy Organizations in The Zapatista Movement. *Sociological Focus*, Vol. 37, No. 3, Special Issue: *Social Movements In The New Century*, 269-286.
- Matzner, A. (2002, November 11). *Research and discussion paper: On the Question of Origins: Kathoey and Thai Culture*. Diambil kembali dari Transgender Asia: http://www.transgenderasia.org/paper_on_the_question_of_origins.htm
- McCargo, D. (2012). *Mapping national anxieties: Thailand's Southern conflict*. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press.
- MSDHS, & UNDP. (2018). *Legal Gender Recognition in Thailand: A Legal and Policy Review*. Bangkok: United Nations Development Program.
- Ocha, W. (2013). Rethinking Gender: Negotiating Future Queer Rights in Thailand. *Gender, Technology and Development*, Vol. 17, No.1, 79-104.
- Ojanen, T. T. (2009). Sexual/gender minorities in Thailand: Identities, challenges, and voluntary-sector counseling. *Sexuality Research and Social Policy*, Vol. 6, No. 2, 4-34.
- Peter, H. (2000). *An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues*. UK: Cambridge University Press.
- Pullen, C., & Cooper, M. (2010). *LGBT Identity and Online New Media*. New York: Routledge.
- PurpleSky. (2010, September-Desember). *First Purple Sky Network Governing Board elects Chair and sets priority to challenge stigma and discrimination among MSM and transgender people in Greater Mekong Sub region*. Diambil kembali dari Amfar: https://www.amfar.org/uploadedFiles/Around_the_World/TreatAsia/Publications/PSN-Vol6.pdf?n=388
- Robinson, P., Heitmann, S., & Dieke, D. P. (2011). *Research Themes for Tourism*. United Kingdom: CAB International.
- RSAT. (2018, September 12). *Blue Sky Coloring Book of Thailand*. Diambil kembali dari Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT): <https://www.rsat.info/»ÃĐÇŃμŌ¿éŌËŌÃŌ€Œ>
- Sabpaitoon, P. (2018, Maret 27). *LGBTI Discrimination 'still prevalent'*. Diambil kembali dari bangkokpost: <https://www.bangkokpost.com/news/general/1435614/lgbti-discrimi-nation-still-prevalent>
- Sanders, D. (2011). The Rainbow Lobby: The Sexual Diversity Network and the Military-Installed Government in Thailand . Dalam P. A. Jackson, *Queer Bangkok: Twenty First Century Markets, Media, and Rights*. Hongkong: Hongkong University Press.
- Sato, Y., & Hirata, K. (2010). *Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Silva, J. P. (2007). Strategies of Transnational Advocacy Networks for Brazilian Foreign Policy: an introduction. *Encuentro Latinoamericano*, Vol. 4 No. 1, 63-81.
- Stonewall. (2018, June 09). *The Sustainable Development Goals and LGBT Inclusion* . Diambil kembali dari Stonewall International: https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/sdg-guide_2.pdf
- Suriyasarn, B. (2016). *Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand*. Swiss: International Labour Organization.
- UNAIDS. (2015). *Thailand Endings AIDS*. Thailand: National AIDS Committee.
- UNDP, & USAID. (2014). *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report*. Bangkok.
- USAID. (2018, January). *USAID Community Partnership*. Diambil kembali dari USAID: <https://www.usaid.gov/asia-regional/factsheets/usaid-community-partnership>
- Walks, M. (2014). "We're Here and We're Queer?": An Introduction to Studies in Queer Anthropology. *Anthropologica*, Vol. 56, No. 1, 13-16.
- WHO. (2012, Januari 12). *HIV and AIDS*. Diambil kembali dari World Health Organization Thailand: <http://www.searo.who.int/thailand/areas/hiv/aids/en/>
- Worldbank. (2017). *Thailand Economic Monitor: Digital Transformation August 2017*. Bangkok: World Bank Group.